



Kemaritiman

Majalah Triwulan

Melawan Boikot

Uni Eropa
Atas Sawit

Permasalahan Sampah

Harus Kita Kerjakan
Secara Total dan Tidak
Secara Parsial

Tawarkan Kerjasama Maritim

Kepada

Asean dan India

2 Geopark Indonesia

diakui Sebagai
Taman Bumi Dunia

Sarwono Kusumaatmadja:

Kesadaran Mengenal
Dunia Kemaritiman
Kita Meningkatkan

Wawancara Bersama

Laksamana TNI (Purn) Marsetio

wonderful
indonesia

sail
moyo tambora
2018
DISCOVER SAMUDRA

Sumbawa
9 - 23 september 2018





SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah memasuki tahun keempat. Tahun 2018 yang penuh tantangan. Pada tahun ini juga kami telah memperkenalkan Majalah Kemaritiman satu lagi langkah maju keterbukaan informasi dan engagement dengan para mitra kemaritiman untuk bersama-sama maju mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bukan cuma slogan, melainkan visi kita bersama. Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia mengingat Indonesia berada di garis khatulistiwa, antara dua benua: Asia dan Australia, antara dua samudera: Pasifik dan Hindia. Negara kepulauan terbesar di dunia dengan semua potensi maritim luar biasa.

Untuk mewujudkan visi ini diperlukan kerja luar biasa pula. Pembangunan konektivitas Indonesia, mempermudah jalur logistik, sumber daya, energi, kelautan hingga pariwisata. Sungguh bicara kemaritiman bukan hanya laut semata, kita akan membahas koordinasi, kerja terintegrasi tanpa kenal lelah yang semuanya akan diungkap melalui majalah ini.

Di mana pun Anda nanti, Majalah ini akan terkoneksi dengan Anda. Dari umpan media sosial diikuti oleh puluhan ribu orang hingga aplikasi seluler di seluruh perangkat ke situs web responsif untuk majalah cetak, dapatkan berita kemaritiman yang akan menjangkau dan memengaruhi pembuat keputusan kapan saja dan di mana saja.

Kami juga memiliki www.maritim.go.id selaras dengan siklus berita 24/7, memberikan berita, eksklusif, dalam isu-isu kemaritiman terkini dengan pengkinian berita setiap hari. Sementara, Majalah Kemaritiman menjadi kombinasi kuat dari berita, budaya, dan gagasan dengan sudut pandang Indonesia poros maritim dunia dikupas dengan jernih dan terpercaya.

Majalah Kemaritiman disiapkan untuk konsumen informasi millennial dan dirancang untuk mengejutkan, mendidik dan menyenangkan. Dalam komponen cetak dari ekosistem berita modern, Majalah Kemaritiman memberikan konten pemikiran untuk pembaca cerdas. Baik platform digital maupun cetak adalah saluran berita pilihan yang mudah diakses. Akhir kata, selamat menikmati edisi kedua majalah kemaritiman, mari bersama wujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia !

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Agus Purwoto

TIM REDAKSI

Terbitan

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman.

Penanggung Jawab

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman,
Kepala Biro Informasi dan Hukum.

Redaktur

Anjang Bangun Prasetyo
Kepala Bagian Humas,
Khairul Hidayati
Kepala Subbagian Publikasi,
Rastin Eka Prasetya
Kepala Subbagian Dokumentasi,
Fatma Puspita
Kepala Subbagian Pengelolaan Opini Publik.

Jurnalist

Fahdiansyah Kasmiri,
Nostal Nuans Saputri,
Ilma Nurweli.

Photographer

Muchlisa Choiriah,
Vebianto Faladi,
Ahmad Budiarto Fahmi,
Satriyo Nugroho.

Desain Grafis dan Layout

Dinta Audi Rahmalia,
Bella Rahmah Herlita,
Prayogi Setiawan.

Catatan Editor

Assalamualaikum,

Salam Maritim, setelah sukses dengan peluncuran edisi perdana Majalah Kemaritiman, Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kembali meluncurkan edisi II Majalah Kemaritiman yang merupakan pembaharuan dari media cetak sebelumnya yaitu Buletin Kemaritiman.

Pada edisi kedua ini, Majalah Kemaritiman akan menampilkan 2 halaman penuh foto-foto terkait event olahraga terbesar se-Asia, yakni Asian Games ke 18 Jakarta-Palembang. Kemudian, berita seputar keberhasilan Indonesia melalui 'diplomasi sawit' yang diketuai oleh Ketua Tim Negosiasi RI sekaligus Menko Bidang Kemaritiman Luhut B.Pandjaitan dalam melobi negara-negara anggota Uni Eropa yang berencana akan melakukan boikot terhadap sawit dan produk turunannya di pasar Eropa, dan juga artikel utama terkait upaya pemerintah Indonesia dalam perang melawan sampah, utamanya sampah plastik serta 'massive movement' revitalisasi dan rehabilitasi Sungai terpanjang dan paling strategis di Jawa Barat yaitu Sungai Citarum.

Artikel lainnya yang akan diulas adalah, komitmen Indonesia dalam menjaga keragaman sumber daya hayati laut Indonesia dan sumber daya hayati dunia. Kemudian artikel mengenai kemajuan pembangunan proyek light rail transit (LRT) yang telah dimulai sejak bulan September 2015 dan ditargetkan akan mencapai

80 persen progress pembangunannya di akhir tahun 2018 nanti.

Tidak kalah menarik adalah artikel mengenai keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan 2 geoparknya untuk diakui sebagai Taman Bumi Dunia, serta artikel perihal upaya intensif pemerintah Indonesia melalui Kemenko Maritim untuk terus menjalin kerja sama internasional bidang kemaritiman dengan berbagai negara di dunia.

Majalah Kemaritiman edisi kali ini pun akan menyuguhkan kolom 'Tokoh Bicara', yang akan diisi dari hasil wawancara (Purn) Marsetio yang akan membahas mengenai peranan Indonesia dalam perubahan geopolitik dunia serta bagaimana Indonesia harus bersikap sebagai negara besar dan disegani di kawasan Asia – Pasifik. Lalu, ada pula wawancara eksklusif lainnya dengan mantan Menteri era Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sekaligus pakar lingkungan hidup dan kemaritiman yakni, Sarwono Kusumaatmadja yang akan membagikan sedikit ilmu dan pengalamannya kepada para generasi muda.

Akhir kata, saya mewakili seluruh tim yang telah bekerja keras untuk penerbitan edisi II Majalah Kemaritiman ini mengemukakan maaf apabila masih ada kekurangan yang tidak disengaja, dan juga mengucapkan selamat membaca edisi II Majalah Kemaritiman ini. Segala kritik dan saran anda semua sangat kami hargai, dan kami juga membuka diri apabila ada dari para pembaca yang ingin mengirimkan artikel untuk dapat dimuat di Majalah Kemaritiman maupun website, www.maritim.go.id

Salam Maritim,
Wassalamualaikum.

DAFTAR ISI

Berita Utama



7 Kemenko Bidang Kemaritiman
**Tawarkan Kerja Sama
Kepada Asean dan India**



9 Permasalahan Sampah
**Harus Kita Kerjakan
Secara Total dan
Tidak Secara Parsial**

Berita



22 Pembangunan Proyek LRT
Terus Mengalami Kemajuan

17 Melawan Boikot
Uni Eropa Atas Sawit

15 Dua Geopark Indonesia
diakui sebagai
Taman Bumi Dunia

19 Indonesia Terus Berkomitmen
Menjaga Keberagaman
Sumber Daya Hayati



25 **Bincang Tokoh**

Laksamana
TNI (Purn) Marsetio
Sarwono
Kusumaatmadja



33 **Opini**

Ideologi Anti-sawit
di Eropa

Arif Havas Oegroseno
Alumnus Harvard Law School 1992

Explore

Situ Cisanti dan
Tujuh Mata Air Hulu

37 **Sungai Citarum**

Cerita Pendek

39 Suatu Pagi di Bawah
Jembatan Layang

Gallery

43 Kumpulan Foto Kegiatan
Kemenko Bidang Kemaritiman

Dua Geopark Indonesia diakui sebagai Taman Bumi Dunia

Maritim, Setelah sebelumnya ada dua taman bumi (geopark) Indonesia, yakni Gunung Batur dan Gunung Sewu masuk dalam taman bumi global Unesco (UGG), pada April tahun 2018, ada dua taman bumi Indonesia yang kembali masuk ke dalam daftar lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan PBB tersebut.

Taman bumi Indonesia yang baru saja diakui sebagai taman bumi Unesco adalah Gunung Rinjani di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ciletuh Pelabuhan Ratu, Provinsi Jawa Barat. Rinjani dan Ciletuh diakui bersama dengan sebelas taman bumi lainnya yang tersebar di Afrika, Asia, Eropa dan Amerika Utara.

Dengan demikian, di Asia Tenggara, dari total tujuh UNESCO Global Geopark, empat di antaranya ada di tanah air. Indonesia juga memiliki tujuh kawasan Geopark Nasional, serta terdapat lebih kurang 80 kawasan yang menjadi kandidat Geopark Nasional pada 2025.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam daftar taman bumi Unesco, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan mengaku bangga. Menurutnya, ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dengan pengakuan tersebut. "Geopark bisa menjadi solusi alternatif pemanfaatan kekayaan alam dan budaya untuk kebangkitan ekonomi dan pemberdayaan sosial yang tetap mengedepankan faktor pelestarian dan perlindungan lingkungan," ujarnya di Jakarta.

Lebih jauh, Menko menyampaikan pengakuan global Unesco dapat meningkatkan nilai dan daya tarik kawasan. Menurutnya, dengan pengakuan Unesco maka peluang investasi di beberapa sektor pasca penetapan dua situs taman bumi sebagai UGG. "Dari pengembangan geopark sektor jasa wisata, industri UMKM, industri kreatif, perhotelan, pertanian, kuliner dan beberapa sektor terkait lainnya bisa tumbuh," beber Menko Luhut.

Sebagai gambaran, BPS Kabupaten Gunung Kidul mencatat, pertumbuhan jumlah kunjungan dan homestay di Ciletuh-Palabuhanra-

tu sejak ditetapkan menjadi geopark nasional tahun 2015 dan unesco global geopark tahun 2018 meningkat dari 300 ribuan menjadi 900 ribuan. Lalu, pasca ditetapkannya Gunung Sewu menjadi kawasan Geopark dan UNESCO Global Geopark pada tahun 2015, angka Kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul menurun dari 22,71% menjadi 18,65%. Nilai investasi pun meningkat dari Rp 106 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 1,6 triliun rupiah pada triwulan I tahun 2016.

Terpisah, Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pengembangan geopark dapat memberikan kontribusi nyata, antara lain, untuk pengembangan wilayah, peningkatan ketahanan masyarakat dari bencana, mendidik masyarakat pada kehidupan yang baik dengan menghormati budaya yang beragam, pemberdayaan perempuan untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat dengan adanya wisata geopark, serta terjalinnya kerja sama antar daerah dan negara dalam mendayagunakan keragaman geologi, keragaman hayati dan budaya, serta jasa lingkungan (amenities) secara berkelanjutan.

Sebagaimana identifikasi yang dilakukan oleh UNESCO (2017), pengembangan geopark juga berkontribusi bagi upaya Indonesia dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Secara konkret, pengembangan geopark direfleksikan sedikitnya dalam delapan tujuan. Kedelapan tujuan tersebut, yakni: (i) Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan; (ii) Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas; (iii) Tujuan 5, Kesenjangan Gender; (iv) Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (v) Tujuan 11, Kota yang Berkelanjutan; (vi) Tujuan 12, Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab; (vii) Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim; serta (viii) Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Geopark adalah sebuah wilayah geografi yang memiliki warisan geologi dan keanekaragaman geologi yang bernilai tinggi, termasuk di

dalamnya keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang menyatu, lalu dikembangkan dengan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi dan pengembangan ekonomi lokal.

Dikutip dari laman Unesco, Taman Bumi Global Unesco adalah sebuah wilayah geografis di mana situs dan lanskap yang menjadi aset geologis internasional dikelola dengan konsep konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Dengan konsep ini, sebuah taman bumi yang masuk dalam jaringan Unesco akan dikembangkan dengan pendekatan konservasi dan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal. Saat ini, ada 140 taman bumi yang masuk dalam jejaring Unesco. Taman-taman tersebut berada di 38 negara, empat di antaranya berada di Indonesia. Keanggotaan UGG dibatasi hanya empat tahun dan akan dilakukan peninjauan setelahnya.

Untuk mendukung perkembangan Geopark, Kemenko Bidang Kemaritiman bersama dengan Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal menyelenggarakan Konferensi Nasional Geopark I pada hari Kamis (12-7-2018). Rencananya, konferensi tersebut akan dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menpar Arief Yahya dan Kepala Bekraf Triawan Munaf serta kalangan akademisi dan pegiat geopark. Total hadirin diperkirakan mencapai 500 orang dan akan membahas tentang pengembangan geopark untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta pelestarian lingkungan.

Konferensi yang fokus membahas pengembangan geopark untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan serta pelestarian lingkungan ini sekaligus menjadi awal bagi konferensi lanjutan berskala internasional yang akan dilangsungkan pada September 2019 mendatang. Dalam konferensi ini, pertama kalinya Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah Asia Pacific Geopark Network (APGN) Conference di lokasi UNESCO Global Geopark Rinjani, Mataram, Lombok. (**)



Permasalahan Sampah Harus Kita Kerjakan Secara Total dan Tidak Secara Parsial

Permasalahan sampah, khususnya sampah plastik terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk segera diselesaikan, oleh sebab masalah sampah ini bukan lagi persoalan domestik tetapi sudah menjadi masalah global. "Sampah ini sekarantg menjadi masalah sentral, masalah global, tidak bisa ditangani secara parsial," ujar Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, saat melaksanakan kunjungan kerja di Labuan Bajo, belum lama ini.

Pengelolaan sampah yang baik dan berkualitas terus dikembangkan di banyak negara dengan melibatkan berbagai ahli meltaui berbagai teknologi pengolah sampah yang ramah lingkungan. Indonesia pun tidak tinggal diam, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) terus menggaungkan kampanye memerangi sampah baik di darat maupun perairan, tidak hanya sekedar kampanye, berbagai aksi nyata juga telah dan tengah dilaksanakan. Antara lain, dengan mengadakan berbagai konferensi nasional, seperti misalnya Waste to Energy Conference yang diadakan pada bulan September tahun lalu, kemudian pengolahan sampah dengan proses insinerasi dan pemanfaatan panas menjadi tenaga listrik (waste to energy) yang diterapkan di Intermediate Treatment Facility (teknologi ramah lingkungan yang mampu mereduksi sampah secara baik dan efektif) di Sunter, Jakarta Utara.

Nantinya, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 35/2018, tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Sampah, akan ada 12 kota besar yang akan diterapkan teknologi pengolah sampah serupa, yakni Palembang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Bekasi, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado dan DKI Jakarta.

Kemenko Maritim dengan menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga melakukan inovasi pengolahan sampah selaras dengan pelaksanaan proyek strategis nasional (Perpres No 58/2017) terkait

proyek infrastruktur energi asal sampah kota-kota besar di Indonesia. Dan proyek ini diwujudkan dengan pembangunan pilot project pengolahan sampah proses thermal (PLTSA) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dan BPPT dalam Pengkajian, Penerapan dan Pemasarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah. Kota-kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta yang timbunan sampahnya mencapai 7000 ton/hari, memerlukan solusi teknologi untuk memusnahkan sampah secara cepat, signifikan dan ramah lingkungan.

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan pernah menyatakan, pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi 70 persen sampah pada tahun 2025. Menko Luhut pun mengakui bahwasanya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan seperti ibarat membalik telapak tangan, "Tetapi kami telah menyusun beberapa strategi di antaranya mengalokasikan sumber sampah yang dekat dari laut, penegakan hukum, memperbanyak riset, dan bersama Bank Dunia kami menciptakan sistem yang lebih baik untuk meningkatkan pemungutan sampah di kota-kota yang langsung berbatasan dengan laut," tegasnya beberapa waktu silam.

Permasalahan sampah yang dinilai telah mencapai tahap darurat, lalu mendapatkan perhatian serius dari lembaga keuangan terkemuka dunia, diantaranya dari Bank Dunia. Bahkan, Presiden Bank Dunia Jim Young Kim sempat mengunjungi Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018, untuk melihat langsung apa saja hal-hal yang perlu dibantu dan dicarikan solusi bersama untuk menuntaskan permasalahan sampah yang menjadi fokus perhatian global. Dengan kata lain, kunjungan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim ke Indonesia kali ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dengan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam mem-

erangi sampah plastik. Bank Dunia sendiri saat ini akan menjalankan proyek Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia (Indonesia Oceans Multi Donor Trust Fund) yang memberikan dukungan strategis terhadap seluruh Agenda Kelautan Indonesia. Dana Perwalian ini dikelola oleh Bank Dunia, yang merupakan dana hibah dari Norwegia dan Denmark, masing-masing berjumlah US\$1.4 juta dan US\$ 875 ribu. Dana ini bertujuan menciptakan sinergi dengan program sejenis lainnya di bawah Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya, termasuk dalam meningkatkan pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, badan keuangan ini juga menjalankan Proyek Pengelolaan Sampah Padat Bank Dunia (National Municipal Solid Waste Management Project), yaitu memberikan dukungan kepada Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan program pengelolaan sampah senilai US\$1.2 milyar yang sebagian besar akan didanai oleh pemerintah pusat dan daerah. Program ini diharapkan dapat menarik investasi pihak swasta senilai US\$1.5 milyar.

Pada program yang akan berlangsung selama enam tahun ini, diharapkan sekitar 30 kota di Indonesia dapat mencapai sistem pemungutan, pengelolaan dan pembuangan sampah yang lebih baik, dan secara keseluruhan dapat mengurangi jumlah sampah yang mengalir ke laut, khususnya sampah plastik.

Ada 2 poin dukungan utama yang akan diberikan. Pertama, dukungan strategis terhadap seluruh Agenda Kelautan Indonesia. Dukungan yang diberikan antara lain mendukung perbaikan terhadap perencanaan, koordinasi, kebijakan dan pendanaan strategi kelautan Indonesia. Kedua, mendukung upaya pengurangan limbah plastik yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Plastik. Ketiga, mendukung ketahanan daerah pesisir dan sumber daya laut.

Bahwa, masalah sampah plastik dan perbaikan kualitas generasi muda juga menjadi fokus perhatian pemerintah, seperti dijelaskan oleh Menko Luhut, Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Melalui Perpres ini dibentuk Satuan Tugas Citarum di bawah komando Gubernur Jawa Barat dengan dukungan Pangdam III/Siliwangi dan Pangdam Jaya sebagai Wakil Bidang Penataan Ekosistem dan Pengendalian serta Kajati dan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya sebagai Wakil Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum. Dengan terbitnya Perpres ini diharapkan adanya koordinasi dan sinergi yang lebih baik diantara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dengan dukungan TNI dan melibatkan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga sektor swasta. Pada saat yang sama, upaya penegakan hukum juga perlu dilakukan secara komprehensif dan konsisten.

Diketahui, kondisi Sungai Citarum saat ini memang cukup memprihatinkan. Di bagian hulu, telah terjadi alih fungsi lahan hutan lindung secara masif, begitu pula limbah buangan rumah tangga dan jumlah sampah yang besar. Demikian halnya dengan limbah industri, masih banyak industri yang tidak melakukan pengolahan limbah secara baik dan membuang limbahnya ke sungai. "Selama ini Pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi masalah sampah dan stunting pun kami perhatikan. Kami akan minta pemerintah daerah, kabupaten, dan kota juga melakukan hal yang sama, mungkin bisa kita terapkan sistem reward and punishment" ujarnya.

Presiden Bank Dunia Jim Young Kim lantas menimpali dengan menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia yang telah bekerja keras dan terintegrasi. "Untuk program stunting saya terkesan dengan kerja yang dilakukan pemerintah Indonesia, sekitar 37% anak Indonesia mengalami stunting. Seperti yang dikatakan Pak Luhut semua harus dilaku-

kan dengan terintegrasi. Jika anak-anak Indonesia mengalami stunting maka mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati pembangunan ini," jelasnya.

Peran masyarakat pun mulai mengemuka dalam upaya perang terhadap sampah ini, seperti yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), suatu gerakan yang mendorong regulasi pembatasan kantong plastik melalui pajak dan pelarangan menceritakan apa yang sudah dilakukannya.

Banjarmasin dan Balikpapan adalah dua kota di Indonesia yang sukses menerapkan 'kantong plastik tidak gratis'. Kedua kota ini adalah kota pesisir yang memiliki banyak sungai, sehingga berkontribusi mencegah sampah kantong plastik masuk ke laut. Sejak diterapkan tahun 2016, penggunaan kantong plastik di Banjarmasin turun 95% dan penjualan tas anyaman hasil kearifan lokal meningkat. Kemudian ada pula, Avani Eco, penghasil produk-produk bioplastik (produk-produk ramah lingkungan yang berasal dari singkong, jagung, tebu, dan bahan alami lain).

"Masalah sampah di sini harus kita selesaikan oleh pemerintah bersama rakyat. Pemerintah menyiapkan mekanismenya, sampah ini masalah serius, untuk menanganinya kita harus lebih serius," ucap Menko Luhut singkat namun tegas.

Kemenko Bidang Kemaritiman Tawarkan Kerja Sama Kepada Asean dan India



Maritim—New Delhi, Dalam Workshop Asean-India ke-2 di New Delhi tentang ekonomi biru, pemerintah RI melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menawarkan beberapa poin kerja sama di bidang kemaritiman dengan negara-negara di kawasan Asean dan India, Rabu (18-7-2018).

Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Basilio Dias Araujo dalam workshop itu menyatakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan dan keberlangsungan laut. "Kami ingin menawarkan kerja sama kepada Asean dan India di dalam hal penanganan pencurian ikan, sampah laut, polusi laut, kerja sama antar penjaga pantai, serta eksplorasi penambangan laut dalam," tuturnya.

Soal penanganan sampah laut, secara detil, Basilio mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki rencana aksi nasional dan mengusulkan dua pengajuan untuk IMO MEPC 73 di London pada bulan Oktober 2018. "Oleh karena itu, Indonesia juga meminta dukungan dari negara-negara di ASEAN dan India untuk merampingkan masalah ini. Untuk menciptakan rencana aksi global untuk memerangi sampah plastik laut di lautan kita," tegasnya. Hal itu, lanjutnya tidak lepas dari hasil penelitian Jenna Jambeck et. dari Georgia University 2015 bahwa ada lima negara (Cina, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) yang paling banyak mencemari lautan di dunia.

Lalu, isu yang menurutnya tidak kalah urgen untuk segera ditangani adalah mengenai pencurian ikan lintas negara. "Ketika ancaman IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing mulai bermunculan dengan kecenderungan membahayakan kelestarian sumber daya perikanan laut, negara-negara mulai saling menunjuk satu sama lain. Beberapa negara mulai menuding negara lain sebagai pelaku atau pelaku IUU Fishing," keluhnya. Padahal, tambahnya, kejahatan perikanan ini bisa merambah ke pelanggaran hukum yang lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa, pelecehan seksual, pelanggaran hak asasi manusia bahkan penyelundupan narkoba.

"Praktek-praktek seperti ini membahayakan kelangsungan laut," tegas Basilio. Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya negara-negara di kawasan bekerja sama dalam menangani ancaman dan tantangan pemanfaatan laut beserta ekosistemnya.

Sementara itu, miliaran orang di seluruh belahan dunia, terutama yang paling miskin, sangat bergantung pada laut yang sehat untuk mencari nafkah dan makanan. Fakta ini yang menyebabkan kebutuhan pemanfaatan laut sekaligus konservasi lingkungan menjadi hal yang krusial. Workshop Asean-India ke-2 tentang ekonomi biru ini membahas tentang penanganan permasalahan kemaritiman. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 delegasi yang terdiri dari akademisi, pejabat pemerintah serta peneliti dari Asean dan India. (**)



Melawan Boikot Uni Eropa Atas Sawit

Maritim--Bulan Januari tahun ini, parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan keputusan untuk melarang penggunaan minyak nabati dari kelapa sawit sebagai biofuel transportasi di Eropa mulai 2021. Sebanyak 485 (60%) dari 751 anggota Parlemen Uni Eropa (PE) menyetujui resolusi diskriminatif anti-sawit dan menutup mata terhadap tak adanya standar yang sama terhadap produk minyak nabati lokal UE.

Argumentasinya, resolusi tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan legislatif UE untuk mengurangi emisi gas rumah kaca minimal hingga 40% pada tahun 2030.

Sebagai negara pengekspor minyak kelapa

sawit terbesar di dunia, Indonesia tidak tinggal diam. Apalagi sekitar 4 juta petani kecil menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit. Bulan April tahun 2018, Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Tim Negosiasi RI dalam perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa. Penunjukan itu, menurut Menko Luhut terkait tugasnya sebagai menteri koordinator yang mengkoordinasikan kebijakan pemerintah di sektor energi.

"Palm oil untuk Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekspor. Penerimaan negara dari situ bisa mendekati 45 milyar dollar. Itu baru dari satu komoditas dan kita belum bicara

produk turunannya sebagai industri super strategis untuk Indonesia ke depannya," jelas Menko Luhut kepada media di Jakarta. Saat ini, tambah dia, total kira-kira ada 17.5 juta orang yang bekerja di bidang sawit, baik langsung di sektor perkebunannya maupun di sektor industri olahannya.

Berkaitan dengan diplomasi untuk melawan diskriminasi ini, Menko Luhut bersama dengan pejabat kementerian terkait melakukan pertemuan dengan beberapa komisioner UE untuk membeberkan data-data tentang kebijakan sawit berkelanjutan dan dampak perkebunan sawit bagi masyarakat.

Selain itu, bekerja sama dengan pemerintah Malaysia, salah satu negara penghasil sawit terbesar lainnya di dunia, dan Vatikan menggelar sebuah seminar. Dalam seminar bertajuk "Promoting Poverty Eradication and Peace and Humanity by Leveraging Agriculture and Plantation Industry" tanggal 15 Mei 2018, Menko Luhut mengangkat peran sawit mengatasi masalah kemiskinan.

"Jadi hal itu (pengurangan angka ekspor sawit) akan berdampak pada kemiskinan. Padahal angka kemiskinan kita sudah turun dari 0.41 menjadi 0.391. Penurunan Gini Ratio (Indonesia) itu banyak karena kelapa sawit. Perkebunan sawit ini banyak dimiliki negara-negara berkembang," bebernya di hadapan hadirin yang berasal dari kalangan akademisi, pejabat pemerintah dan LSM di UE.

Baik pada saat seminar maupun ketika bertemu dengan komisioner perdagangan UE Cecilia Malmström, Menko Luhut menjawab tuduhan yang dilontarkan Eropa mengenai masalah lingkungan hidup, deforestasi dan hak asasi manusia terkait sawit. "Saya jelaskan bagaimana kita peduli pada lingkungan, kita peduli pada gambut. Untuk masalah Hak Asasi Manusia, kita katakan sudah diselesaikan," beber Menko.

Lebih jauh, mengenai deforestasi lahan, Menko Luhut memberi penjelasan bahwa lahan kelapa sawit di Indonesia luasnya 12 juta hektar dan pemerintah sudah menetapkan kebijakan moratorium. "Jadi tidak ada penambahan lahan baru," tuturnya menceritakan penjelasannya kepada komisioner UE.

Tak hanya itu, Menko Luhut menambahkan kelapa sawit lebih efisien dibanding minyak kedelai. "1 kelapa sawit sama dengan 10 soya bean dalam perbandingan luasan tanah untuk menanam. Kita menanam sawit di tanah-tanah bekas, jadi kita tidak menanam yang baru. Kita sudah moratorium sejak 6 tahun yang lalu," pungkasnya.

Dari berbagai lobi tersebut, Uni Eropa memutuskan untuk menunda pelarangan total penggunaan biofuel berbasis minyak kelapa sawit dari 2021 menjadi 2030. Namun demikian perjuangan Indonesia masih belum selesai. Pada tanggal 1 Februari 2019, Komisi UE akan mengadopsi metode, standar, kriteria dan mekanisme pelaporan terkait dengan perhitungan kontribusi standar tinggi atau rendahnya ILUC (Alih Fungsi Lahan Tidak Langsung) serta status ekspansi lahan tanaman atau pakan yang menghasilkan biofuel. Usulan standar tersebut menurut Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno akan diserahkan ke parlemen UE untuk disetujui setelah dilakukan voting pada Bulan Oktober 2018. Agar tidak ada diskriminasi pada sawit dalam penyusunan standar itu, pemerintah membentuk gugus tugas khusus yang terdiri dari kementerian terkait serta asosiasi pengusaha sawit untuk melakukan lobi. (**)



Indonesia Terus Berkomitmen Menjaga Keberagaman Sumber Daya Hayati Lautnya dan Juga Dunia

Indonesia adalah negara kepulauan besar di dunia, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer. Hanya kalah dari Kanada yang memiliki garis pantai sepanjang 202.080 Km (Data Badan Informasi dan Geospasial). Sebagai negara maritim besar, Indonesia pun dianugerahi oleh berbagai macam sumber daya hayati yang tentunya berskala besar pula.

Dengan luas lautan yang hampir 70 persen dari total keseluruhan luas Negara, laut Indonesia adalah pusat penting keanekaragaman hayati. Indonesia mempunyai sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Diperkirakan 37 persen dari spesies ikan di dunia ada di Indonesia di mana beberapa jenis di antaranya mempunyai nilai ekono-

mis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekera-angan, dan rumput laut. Terumbu karang (corral reef) di Indonesia mencapai 50.875 km² (18 persen dari total kawasan terumbu karang dunia). Indonesia juga mempunyai sebaran ekosistem mangrove yang luas, bahkan terbesar di dunia. Luas mangrove di Indonesia sekitar 3.189.359 Ha (20 persen dari total tutupan mangrove di dunia). Ada 48 spesies mangrove di Indonesia, membuat Indonesia menjadi pusat penting keanekaragaman hayati mangrove dunia. Indonesia diperkirakan sebesar 30.000 km², dimana terdapat 30 dari 60 spesies padang lamun yang ada di dunia,

“Potensi sumber daya hayati laut tersebut merupakan modal dasar bagi pembangu-

nan nasional dan juga penyangga kelangsungan kehidupan manusia, baik untuk sandang, pangan, papan, bahan obat-obatan/farmakologi, bisnis, dan jasa ekosistem (ecosystem services),” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Diketahui, Potensi kelautan yang begitu besar pada dasarnya dapat mendorong lapangan kerja, ditaksir kebutuhan lapangan kerja yang akan tersedia sekitar 30 juta orang. Namun, lantaran tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya belum optimal. Bahkan beberapa potensi tersebut mengalami degradasi, seperti: degradasi terumbu karang di Indonesia meningkat dari 10 persen menjadi 50 persen dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, Indonesia sudah kehilangan sebagian besar mangrovenya (50 persen mangrove rusak), ancaman terhadap produksi perikanan Indonesia akibat krisis ganda degradasi ekosistem kelautan serta penangkapan ikan berlebih (over fishing) serta penangkapan ikan ilegal.

Kemudian, ada saja berbagai tantangan yang harus dihadapi saat ini yaitu, masalah kerusakan dan menurunnya tingkat keragaman habitat. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya hayati tersebut.

“Di antaranya adalah problem sampah plastik. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi terganggu, serta pencemaran terhadap ikan-ikan yang akhirnya berdampak buruk bagi manusia itu sendiri,” tambah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono.

Untuk menindak lanjutinya, Kemenko Maritim menyerukan agar upaya untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya sekedar menuntaskan satu aspek saja. Akan tetapi harus mencakup keseluruhan aspek, “Kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait

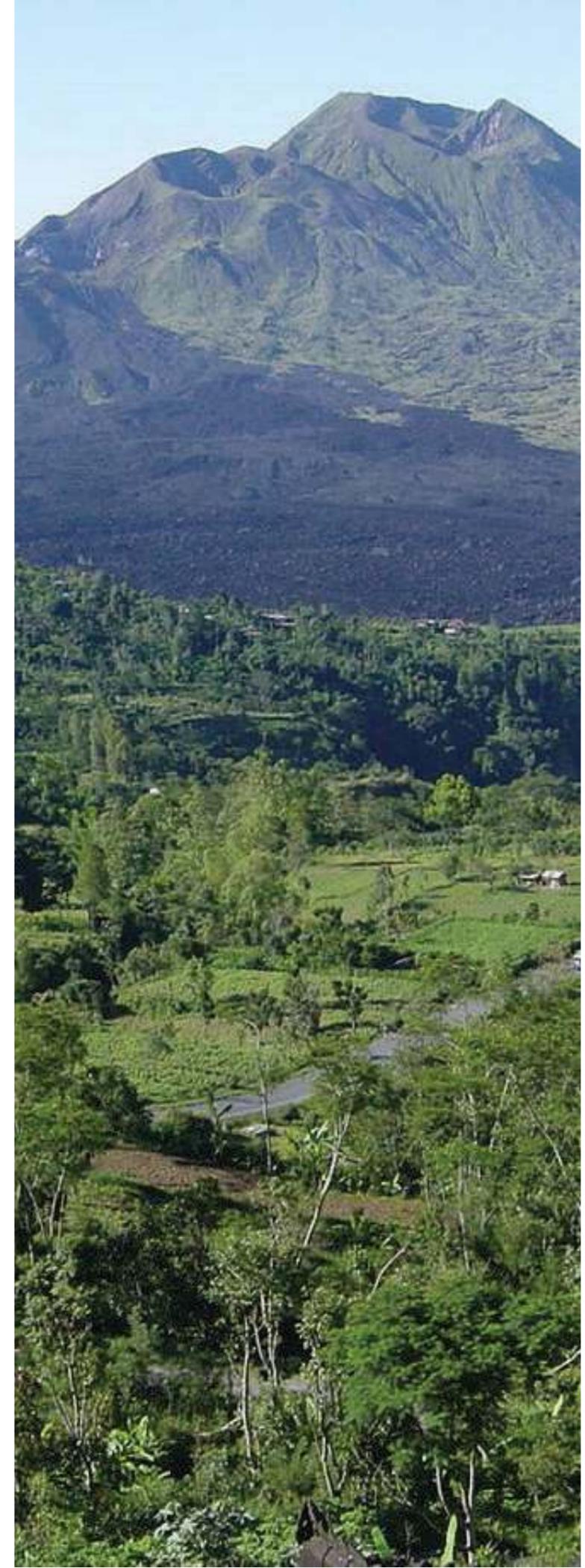
untuk bersama-sama berintegrasi dan bersinergi untuk menangani permasalahan ini, agar menjadi lebih baik ke depannya,” tambahnya.

Tidak hanya wacana, Kemenko Maritim kemudian bergerak cepat di antaranya dengan menginisiasi acara “Seminar Nasional Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Laut Berkelanjutan di Wilayah (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security) CTI-CFF”. Kegiatan ini akan dirangkaikan dengan “Capacity Building Workshop on Sustainable Ocean Initiative in CTI CFFF Region” hasil kerja sama antara Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati, Sekretariat Regional CTI CFF dan Pemerintah Indonesia yang akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 2018. Salah satu peserta seminar ini adalah perwakilan dari Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) di Montreal, Kanada. “Ini dimaksudkan agar kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa melakukan pendalaman dan klarifikasi terkait isu-isu keanekaragaman hayati pesisir dan laut, karena dukungan semua pihak sangat dibutuhkan dalam implementasi berbagai kebijakan, program dan rencana aksi di bidang konservasi keanekaragaman hayati” ujar Deputi Agung.

Salah satu wilayah di dunia yang kaya akan ekosistem terumbu karang dengan kekayaan biota lautnya adalah wilayah pusat terumbu karang dunia (Coral Triangle). Kawasan ini mempunyai kekayaan spesies karang dan ikan karang yang lebih besar dibandingkan dengan tempat lain mana pun di muka bumi ini. Kawasan ini memiliki hampir 73.000 km² terumbu karang (29 persen dari luas terumbu karang dunia) dan membentang di sebagian wilayah enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Membangun kemitraan regional dipandang penting oleh pemerintah Indonesia, oleh karenanya Pemerintah

Indonesia telah menginisiasi pembentukan Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan/CTI-CFF yang telah disepakati secara bersama oleh enam kepala negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon – CT6) pada tahun 2009. “Pemerintah melalui Kemenko Maritim, akan berusaha agar CTI-CFF dapat menjadi wahana untuk meningkatkan profil diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman. CTI-CFF memberikan peluang berinteraksi dan saling melengkapi serta mendukung mekanisme kebijakan luar negeri bilateral dengan negara-negara anggotanya khususnya di bidang kelautan. Sebagai penggagas CTI-CFF, Indonesia dapat lebih berperan untuk menentukan arahan masa depan organisasi yang dapat disesuaikan dengan kepentingan nasional serta disinergikan dengan kebijakan Indonesia,” kata Deputi Agung.

Pemerintah Indonesia juga akan terus meningkatkan efektifitas Komite Nasional CTI-CFF Indonesia yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2015, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No. SKEP 9/ Menko/Maritim/III/2016 dan Keputusan Direktur Jenderal Perencanaan Ruang Laut Nomor 27 / KEP-DJPRL / 2016 tentang Pembentukan Komite dan Kelompok Kerja untuk memastikan agar target dari Rencana Aksi Regional dan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF tercapai. Selain itu, saat ini telah disusun National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2018-2020) yang telah disahkan melalui Peraturan Menko Bidang Kemaritiman selaku Ketua CTI-CFF Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018.



Pembangunan Proyek LRT Terus Mengalami Kemajuan



Pembangunan Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) yang proyek awalnya telah dimulai sejak September 2015 terus menunjukkan kemajuan. Sebelumnya, pada beberapa waktu belakang, atau tepatnya pada tanggal (29-12-2017) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Menko Luhut B. Pandjaitan turut menyaksikan Kontrak Pinjaman Kredit Sindikasi dari 12 bank dan lembaga pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Ke 12 bank dan lembaga pembiayaan yang menjadi kreditur bagi proyek LRT antara lain Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, CIMB Niaga, PT SMI, Bank DKI, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut, Bank Mega, dan BTMU.

Menurut Menko Luhut penandatanganan Kontrak Pinjaman Sindikasi ini merupakan buah kerja keras di seluruh tim yang terlibat. Diketahui, Financial Closing sindikasi proyek LRT bernilai Rp 19,25 triliun yang terdiri dari Rp 18,5 triliun untuk pembangunan sarana, pra sarana dan lain sebagainya. "Dan ini juga saya pikir pendanaan yang sangat baik, terbesar dalam sindikasi pembiayaan infrastruktur dalam jangka waktu yang lama lagi, 18 tahun," ujar Menko Luhut.

Nantinya lanjut Menko Luhut, skema pendanaan seperti ini akan dijadikan model bagi pembiayaan suatu proyek strategis, dengan tujuan agar segala proyek pembangunan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak lagi membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Nanti mungkin refinancing setelah jalan 3 tahun kita lihat mungkin dengan bunga lebih murah, jadi nanti kita bisa kembangkan raising fund untuk LRT ini bisa lebih murah lagi, jadi nanti bisa kembangkan dari Cibubur sampai ke Bogor, mungkin nanti masuk ke Depok kemudian juga dari Cikeas. Nah, model seperti ini bisa kita copy untuk proyek-proyek lain," imbuhnya. Selain itu, proyek LRT Jabodebek merupakan proyek pertama yang terintegrasi dengan pengelolaan yang sangat terbuka dan transparan, oleh karenanya pemerintah meminta semua pihak dapat mengawasi jalannya proyek tersebut. Permintaan tersebut utamanya ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kita menghindari jangan sampai ada korupsi di sini.

Dan kita buat rambu-rambu supaya tidak ada korupsi dalam proyek ini, saya berharap juga BPKP melihat ini," tambah Menko Luhut.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya dan PT KAI akan melakukan kerja sama terkait dengan pemanfaatan prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya secara langsung tanpa membentuk joint venture, dengan tetap memegang azas yang adil dan transparan. Perhitungan pembagian keuntungan untuk proyek, yang dinamakan Transit Oriented Development (TOD), diinisiasi oleh PT Adhi Karya kepada PT KAI pun dilaksanakan secara adil dan transparan.

Pasca penandatanganan Kontrak Pinjaman Kredit Sindikasi LRT, langkah selanjutnya adalah mengkoordinasikan Kementerian/ Lembaga lain untuk pengadaan rangkaian kereta (rolling stock). Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar Rapat koordinasi (rakor) pembahasan pembangunan Jakarta Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Madiun, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Rakor ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamiludin, dan dihadiri oleh (Plt.) Direktur Utama PT. INKA, Mohamad Nur Sodik dan jajaran kepala Divisi di PT Inka, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Adhi Karya, dan Institut Teknologi Bandung (ITB). "Rakor ini digelar guna mempercepat keputusan pengadaan rolling stock, ini untuk memastikan dan mempercepat keputusan kita baik pemerintah maupun badan usaha dalam menyelesaikan proyek LRT Jabodebek ini," jelas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamiludin. Deputi Ridwan juga menghimbau, agar Rakor ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan dari Kementerian/Lembaga. "Tinggal justifikasi kebijakan, pandangan politik, atau pandangan tentang apapun terserah

beliau. Pokoknya dari sisi kita sudah hitam putih, jangan sampai pimpinan kita suruh mikir lagi mau yang mananya," terangnya. Seiring waktu berjalan proyek pembangunan LRT sempat menemui kendala perihal pembebasan lahan yang selama ini ditempati oleh Kwartir Nasional (Kwarnas/ satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional).

Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault bahkan menegaskan pihaknya akan terus mempertahankan tanah tersebut. Dia mengatakan pemerintah harus ganti rugi terhadap tanah tersebut karena digunakan sebagai proyek LRT. Namun demikian Menko Maritim Luhut Pandjaitan langsung menegaskan, bahwa pada saat ini permasalahan lahan seluas 4300 meter yang digunakan Kwarnas dinyatakan sudah menemukan solusi. Karena menurutnya, status tanah itu sekarang merupakan milik negara dan akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Saat ini, dilansir dari data PT Adhi Karya per akhir Juni 2018 progress pembangunan proyek kereta api ringan tersebut telah mencapai sekitar 45 persen. Dan detailnya secara keseluruhan adalah sebagai berikut, trase Cawang-Cibubur 62 persen, Cawang-Bekasi Timur 47 persen, dan Cawang-Dukuh Atas 26 persen. Dengan progress demikian, capaian pembangunan proyek LRT pada akhir tahun 2018 diharapkan dapat mencapai sekitar 70 persen. Apabila mengacu pada target operasi tahun 2019, rolling stock LRT rencananya akan mulai didatangkan pada bulan April-Mei 2019, kemudian dilanjutkan dengan pengujian (running test) yang dilakukan secara bertahap maupun keseluruhan.



Wawancara Bersama Laksamana TNI (Purn) Marsetio

Q
Tanggapan Bapak terhadap cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ?

Itu adalah salah satu kutipan dari pidato Presiden pada saat dilantik pada tanggal 20 oktober 2014. Beliau berkata kita telah terlalu lama memunggungi lautan dan memunggungi samudra, kemudian ada kata-kata Jalesveva Jayamahe yang artinya Di laut Kita Jaya, dari sana lah saya melihat dari ke-7 Presiden, beliau adalah satu-satunya presiden yang memiliki visimaritim, sebab Indonesia adalah the biggest archipelagic state (negara kepulauan terbesar) yang menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), di mana menurut konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut yang telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985.

Dan untuk mengimplementasikan itu beliau meletakkan ada lima pilar kemaritiman yaitu, pertama adalah budaya maritim, kedua sumber daya maritim, ketiga konektivitas maritim, keempat diplomasi maritim, dan yang kelima adalah pertahanan maritim. Disinilah bahwa kita semua harus memahami dan melihat sejarah bangsa kita yang sejatinya pernah berjaya dunia kemaritimannya

Q
Sudah sejauh mana progressnya, misalkan dari satu pilar kemaritiman yang dijelaskan di atas yaitu, membangun konektivitas maritim?

Untuk membangun negara Indonesia kita harus tahu dulu, Apa itu membangun konektivitas? artinya adalah kita merangkaikan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia ini sebanyak 17.499 pulau, kita memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan di antara pulau-pulau tersebut adalah lautan namun demikian laut itu bukan berarti sebagai pemisah, justru laut itu sebagai pemersatu. Pemahaman tentang konektivitas bukan hanya membangun tol laut, membangun tol laut itu adalah sebagian. Ingat, dahulu kita tidak membayangkan

sebelum kepemimpinan beliau, turis dari Singapura yang ingin melancong ke Belitung itu mereka harus ke Jakarta terlebih dahulu, namun sekarang sudah bisa langsung dan direct flight, intinya Pak Jokowi itu membangun konektivitas tidak hanya di dalam negeri tetapi juga keluar. Dan yang terpenting lagi konektivitas itu adalah salah satu prasyarat untuk membangun kepariwisataan kita, kita melihat di negara manapun yang diprioritaskan sekarang adalah pariwisatanya. Pada tahun 2015 silam, pendapatan negara Indonesia terbesar datang dari minyak dan gas bumi, batubara, sawit dan pariwisata.

Namun, saat ini sawit menempati urutan pertama, disusul pariwisata, batubara dan terakhir minyak dan gas bumi. Indonesia sudah pula mencanangkan 10 destinasi wisata unggulan, sekarang kita juga terkenal sebagai paru-paru dunia, kita akan mempromosikan juga rain forest destination di hutan Kalimantan. Jadi, setiap daerah yang memiliki keunikan, culture dan berpotensi serta memiliki daya tarik akan kita dorong kepariwisataannya. Syaratnya mendorong dan mempromosikan suatu daerah tentunya perlu apa? Ya perlu konektivitas. Seperti sarana dan pra sarana yang kita siapkan, untuk logistik juga dan untuk transportasi kita siapkan juga bandara dan pelabuhannya. Singkat kata, pemerintahan sekarang bisa dinilai sudah on the track, ini bisa dilihat dari gencarnya berbagai pembangunan proyek infrastruktur saat ini. Beliau juga ada berbagai proyek-proyek strategis sampai dengan tahun 2019.

Q
Terkait pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Pertahanan pada Universitas Pertahanan, apakah ada yang bisa Bapak ceritakan sedikit dan juga sekilas orasi ilmiah yang Bapak sampaikan?

Alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan dari Menteri Riset dan Teknologi-Pendidikan Tinggi, untuk menjadi Profesor pertama Ilmu Pertahanan bidang budaya teknologi kemaritiman. Artinya apa? Hal-hal mengenai pertahanan nasional ini perlu kita tingkatkan. Dan ini adalah bagaimana saya melihat Indonesia

harus kuat dan terpandang di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Dalam orasi ilmiah saya yang berjudul “Perubahan Tatanan Geo-Maritim Pasca Pembentukan SINDOPACOM dan Implikasinya Terhadap Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Indonesia,” saya menilai Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaannya terhadap lingkungan maritim dan melakukan evaluasi terhadap Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Perlu diingat, saat ini tengah terjadi perebutan hegemoni di kawasan Asia Pasifik, maka saya perlu melakukan analisa dan kajian mengenai dampak dari makin besarnya kewenangan USPACOM (US Pacific Command) yang kini berubah menjadi USINDOPACOM (US Indie Ocean Pacific Command) karena mereka telah memperluas kewenangannya hingga kawasan Timur Tengah. Artinya? Pacific Command memiliki dua armada, yakni Armada ke 5 dan Armada ke 7, ini tentunya akan merubah tatanan dunia. Amerika Serikat saat ini tengah berupaya mempertahankan hegemoninya di kawasan Asia-Pasifik dan tidak ingin tersaingi oleh Tiongkok, sebab kebijakan negeri tirai bambu itu dengan One Belt One Road dan klaim terhadap wilayah Laut China Selatan dianggap Presiden Trump sebagai upaya merebut hegemoninya.

Perlu diketahui, pergerakan manusia, barang dan energi sejak dahulu sangat bergantung kepada transportasi laut. Tercatat 30 persen melewati Laut China Selatan, sementara di Selat Malaka tercatat sekitar 15 juta barel minyak dan gas bumi dan 90 ribu kapal melintas di perairan strategis tersebut. Sebagai negara yang posisinya sangat strategis karena terletak diantara dua benua dan dua samudera, maka sudah seharusnya Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan maritim, apabila kedua kekuatan itu konflik terbuka, maka Indonesia harus memainkan peranannya yang penting di kawasan.

TNI kita harus kuat, Alutsista kita juga harus kuat, namun di era sekarang ini kan tidak ada perang terbuka, tetapi perang saat ini cenderung dengan membentuk aliansi. Dan juga kita harus terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yang kian berakselerasi, dari sinilah negara kita akan maju dan lebih disegani di dunia.

Q

Terakhir, Bagaimana Bapak memandang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di bawah komando Menko Luhut Pandjaitan?

Jujur, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap pendahulu-pendahulunya. Saya melihat Pak Luhut ini sangat luar biasa, sebab beliau adalah tamatan AKABRI tahun 1970 terbaik atau Adhi Makayasa. Sebagai seorang yang terbaik, beliau itu mesti apa? Pertama beliau harus tanggap sekaligus trengginas, artinya apa? dia haruslah cerdas, kemudian mempunyai sikap mental yang bagus, kemudian secara fisik juga harus bagus dan beliau juga mempunyai relasi yang luas. Dalam era sekarang tidak cukup kepintaran, namun juga haruslah pemimpin yang humble, smart dan bisa membangun jaringan. Pendek kata, beliau memiliki semua itu, beliau sangat lengkap dan sangat mumpuni untuk memimpin. Waktu itu beliau menelepon saya karena tidak dapat menghadiri pengukuhan saya sebagai Guru Besar, beliau bilang “Mar, maaf saya tidak bisa hadir karena harus memenuhi panggilan Bapak Presiden” saya jawab “Tak mengapa Bapak, yang penting saya sudah dapat restu Bapak”, salut saya untuk Pak Luhut.



Laksamana TNI (Purn) Prof Dr. Marsetio, S.sos.

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Desember 1956

Pendidikan Umum:

- SI FISIP Universitas WR Supratman
- S2 Universitas Wijaya Pura
- S3 Universitas Gajah Mada

Pendidikan Militer:

- AKABRI Laut Angkatan 26 tahun 1981 (Lulusan Terbaik/Adhi Makayasa)
- Operation School Holland tahun 1986
- ISC Royal Naval College UK 1991
- Naval Operation Course Italy 2002
- Sennior Executive Course Hawaii, USA 2007
- Harvard Kennedy School Boston, USA 2014

Jabatan Saat Ini:

- Penasihat Ahli Menko Bidang Kemaritiman
- Staf Ahli Menteri Pariwisata
- Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kalimantan Tengah (Calon Ibukota RI)
- Utusan Khusus RI di International Maritime Organization di London, UK.



Tim Liputan Majalah Kemaritiman mendapat kesempatan spesial untuk berkunjung dan mewawancarai salah satu tokoh yang sangat concern terhadap masalah kemaritiman dan juga lingkungan hidup. Adalah Sarwono Kusumaatmadja yang merupakan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto (menjabat 1993-1998), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia ke-5 (1988-1993) dan Menteri Eksplorasi Kelautan Indonesia ke-1 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Tokoh yang dikenal cerdas dan kritis namun tetap bersahaja ini membagikan pengalamannya di halaman depan rumahnya yang asri di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan pada hari Jumat (20-7-2018), dan berikut adalah petikan wawancaranya.

Sarwono Kusumaatmadja: Kesadaran Mengenai Dunia Kemaritiman Kita Meningkatkan

Q Bapak pernah menjadi Menteri Eksplorasi Kelautan yang pertama di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Di bidang kemaritiman saja, apakah ada perkembangan sampai dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini?

Yang jelas kesadaran meningkat. Belum memadai, tapi lumayan lah. Apalagi sebetulnya kita memiliki kendala yang besar dalam memahami jati diri kita sebagai negara kepulauan. Sekarang saya tanya sama kalian, waktu di SD, kalau disuruh bikin gambar pemandangan, yang keluar tuh apa? Pasti sebagian besar anak menggambar pemandangan sawah dengan latar belakang gunung kan? Tidak pernah gambar laut, ikan, kapal.

Baru sekarang-sekarang saja banyak anak-anak yang gambar itu. Nah jadi kita ibarat menjadi tawanan dalam pola pikir yang ditanamkan sejak kecil, Kita ini negara agraris. Dan ironisnya adalah, di satu pihak kita menamakan kita negara agraris, tapi dinilai belum mampu menyejahterakan petani, itu kan ironis. Nah, oleh karena itu kita tidak mempunyai visi maritim, tak punya visi kelautan, dan itu semua dirubah melalui perjuangan kita merealisasikan apa yang disebut Deklarasi Juanda, yang diejawantahkan oleh Presiden Gus Dur saat beliau menjabat dan juga Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

Q Ada cerita menarik dengan Presiden ke 4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid?

Yang menarik soal Gus Dur adalah, kita berdua kebetulan sedang berbincang tentang masalah kelautan di tahun 1986, waktu itu saya sebagai Sekjen Golkar, Gus Dur sering bertemu saya untuk sekedar berbincang dan berdiskusi mengenai segala hal. Nah setelah ngobrol soal maritim tiba-tiba dia bilang begini sama saya, "Satu waktu saya akan jadi Presiden Indonesia, dan situ yang ngurus laut sebagai Menteri ya Sar". Dan tahun 1999 akhirnya hal itu terjadi, padahal waktu itu saya tidak punya rencana jadi Menteri. Bahkan saya sedang mempersiapkan studi pasca sarjana di luar negeri dan itu sudah fixed, apalagi segala ongkos ditanggung. Tahu-tahu saya dengar nama saya diumumkan sama Gus Dur, dan yang mengumumkan adalah Ibu Mega, saya ditunjuk sebagai sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Pendek kata saya datang ke Gus Dur, "Loh Gus, saya kan sudah bilang kalau saya nggak mau jadi Menteri, kok dijadiin juga?, tetapi dia bilang "Loh kan saya sudah bilang sama sampeyan kalau saya jadi Presiden dan kamu jadi Menteri-nya untuk ngurusin Laut," saya Tanya kapan itu tepatnya Gus?, beliau jawab dengan tegas, "Tahun 1986, masa kamu tidak ingat?". Itulah salah satu sisi luar biasanya seorang Gus, saya saja sudah tidak ingat dan tidak anggap serius, namun beliau adalah seorang yang sangat konsisten dan berdaya ingat tinggi.

Q Kendala apa yang dihadapi saat pertama menjabat? mengingat Kementerian Eksplorasi Laut adalah lembaga negara baru?

Pertama, itu di luar perencanaan. Berbeda dengan era Presiden Soeharto, kalau Pak Harto ingin menciptakan suatu Kementerian baru, dia bikin panitia persiapan dulu. Ini kan tiba-tiba. Jadi tidak ada anggaran, tidak ada Keppres nya, namun Keppres nya baru dibuat kemudian. Jadi, setelah nomenklatur nya ada baru dibuat Keppres. Kedua, kami mengerjakan apa? Tidak jelas juga, dan Gus Dur cuma bilang sama saya "Ya ambil aja kerjaan orang yang ada laut-lautnya" (sambil tertawa). Ketiga, kita juga tidak punya kantor, jadi saya

pinjem rumahnya Pak Arifin Panigoro, dan berkantor di situ. Kemudian, saya mulai memanggil para pejabat yang kerja di tempat lain untuk bantu saya. Sebut saja mantan Menko Maritim Indroyono Susilo, lalu Pak Purwaka, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri, lalu Pak Icuk Sukafri, Pak Gusran Kadri, Pak Abubakar,

Q

Terkait Nawacita Presiden Joko Widodo, cita-cita Presiden adalah "Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia", bagaimana tanggapan Bapak?

Sekarang pun sudah jadi Poros Maritim Dunia, tetapi kita tidak menarik keuntungan apapun dari kenyataan itu. Nah, kenapa kita sudah jadi Poros Maritim Dunia?, karena hampir 65 persen dari angkutan barang antara Eropa dengan kawasan Pasifik itu harus melalui perairan Indonesia. Terutama selat Malaka dan juga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), tapi kita menarik keuntungan apa dari situ? Belum ada. Nah, tafsiran saya, yang Ingin direalisasikan Presiden Jokowi adalah kita membangun koneksitas antara kita sendiri untuk kemudian kita bisa memanfaatkan kehadiran kita dalam Poros Maritim Dunia. Itu artinya kita harus punya armada dalam negeri yang kuat, harus punya Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang kuat, harus punya ekonomi maritim yang kuat untuk diri kita sendiri. Jadi sebetulnya potensi Ekonomi Indonesia itu sendiri luar biasa kuat, pernah ada orang Singapura yang bilang "Dunia memerlukan Indonesia, tapi kalian tak memerlukan dunia, sebab segala sesuatunya kalian sudah punya," Jadi potensi yang begitu besar ini yang harus direalisasikan dan itu hanya mungkin dilakukan kalau interkoneksi antar pulau kita itu kuat. Nah makanya dalam Deklarasi Juanda itu dirumuskan bahwa Laut adalah penghubung antar pulau, laut sebagai pemersatu, dan sekarang sedang diupayakan terus menerus.

Q

Pada pemerintahan sekarang, adakah perkembangan signifikan di bidang konektivitas antarwilayah di Indonesia?

Ya dari segi pembangunan infrastruktur tentunya sangat terlihat, di mana pembangunan infrastruktur sangat gencar dimana-mana, seperti banyaknya pelabuhan dan bandara baru yang dibangun dan sudah beroperasi. Namun saya rasa kelembagaan dan SDM nya masih belum mengejar, hal ini bisa dibuktikan dengan masih adanya kecelakaan di perairan kita. Berbeda dengan perhubungan udara, kita dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil mengadopsi standar keamanan yang sangat tinggi untuk penerbangan udara, dan maskapai-maskapai Indonesia tanpa terkecuali sudah diizinkan masuk ke wilayah Uni Eropa. Solusinya? Harus ada kepemimpinan yang tegas, peduli dan menjadi teladan bagi sekelilingnya serta ikut bekerja. Dan Pak Luhut (Menko Maritim) saya lihat orangnya tegas, berusaha efektif dan juga menggunakan bahasa jelas.

Q

Bapak pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, pemerintah sekarang pun sedang merevitalisasi Sungai Citarum, apakah ada tanggapan sebagai seorang yang telah lama berkecimpung di bidang lingkungan hidup? Revitalisasi Sungai Citarum?

mereka-mereka itulah inti pertamanya. Dalam 6 bulan kita telah siap segala organisasinya, lengkap program, visi, dan kesemuanya sudah siap. Berkat mereka itulah sebagai peletak dasar kementerian pertama yang fokus mengurus laut, mereka itu disebut juga generasi jengala.

Saya kira itu program luar biasa dan memang sudah waktunya. Sebelumnya menganggap tidak ada apa-apa di sungai yang paling vital di Jawa Barat tersebut. Namun sekarang TNI dilibatkan dan ikut turun tangan langsung mengurus masalah itu. Lewat sosialisasi pemerintah, partisipasi masyarakat dan seluruh pihak pun bagus. Pabrik-pabrik juga ketakutan untuk macam-macam sekarang. Estimasi awal katanya diperlukan waktu 7 tahun untuk merehabilitasi sungai Citarum. Namun, estimasi berikut mengatakan 3 tahun cukup mudah-mudahan itu betul terwujud

Q

Adakah saran dan masukan Bapak untuk pemerintahan sekarang, khususnya di bidang lingkungan hidup maupun kemaritiman?

Ya, lingkungan hidup itu kan aset kita yang paling strategis, seperti yang saya katakan kita mempunyai semuanya di dunia ini. Jangan sampai dirusak oleh perbuatan kita sendiri. Kita punya hutan tropis nomor 3 terbesar di dunia, dengan kapasitas serapan karbon yang sangat tinggi. Kita juga mempunyai pantai terpanjang kedua di dunia yang juga bisa direstorasi melalui penanaman mangrove dan lain sebagainya yang juga mampu menyerap karbon, di samping itu hutan di pantai dan daratan kita itu merupakan habitat dari berbagai kekayaan keanekaragaman hayati yang mempunyai nilai strategis. Jadi Indonesia itu berperan bukan hanya sekedar korban perubahan iklim, tapi dia juga berperan sebagai pencipta solusi bagi kestabilan iklim. Dan kalau kita sadar dan bisa memainkan perannya, kita akan menjadi negara yang terpancip dan kuat, dan kita sudah memperlihatkan gejala-gejala ke arah itu.



Sarwono Kusumaatmadja

Lahir : Jakarta, 24 Juli 1943

Jabatan : - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia ke-5 (1988-1993)
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia ke-2 (1993-1998)
- Menteri Eksplorasi Kelautan Indonesia ke-1 (1999-2001)

Pendidikan : Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1974)

Ir. Sarwono Kusumaatmadja adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta untuk masa bakti 2004-2009. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1974 dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, ia menamatkan pendidikan tingkat atas di Kolese Kanisius.

Sarwono Kusumaatmadja adalah menteri ke-2 yang memimpin lembaga lingkungan hidup. Sebelum menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan VI di tahun 1993-1998, beliau adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan V tahun 1988-1993.

Sedangkan karier menonjolnya di bidang politik dimulai ketika beliau menjadi anggota DPR-RI pada tahun 1971-1988, Anggota MPR tahun 1988 dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (GOLKAR) pada tahun 1983-1988. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Manggala BP-7 di tahun 1984 dan Ketua PELTI Bidang Organisasi di tahun 1986.

Sumber riset:

<http://www.menlh.go.id/ir-sarwono-kusumaatmadja/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarwono_Kusumaatmadja
<https://tirto.id/m/sarwono-kusumaatmadja>

Ideologi Anti-sawit di Eropa

2 Juni 2018

Arif Havas Oegroseno
Alumnus Harvard Law School 1992

Sikap anti-sawit di seluruh Eropa, tidak sekadar Uni Eropa (UE), adalah ideologi. Ideologi tidak harus selalu terkait pada keanggotaan partai atau sistem kenegaraan. Spektrumnya sangat luas dari ekstrem kiri hingga ekstrem kanan.

Anti-sawit di Eropa adalah ideologi baru yang unik karena tak mengenal spektrum. Mereka datang dari kelompok kiri, tengah, tengah-kanan, petani, dan industrialis, seperti ePure, asosiasi 23 industri raksasa etanol Eropa. ePure mengakui melakukan strategi komprehensif agar Parlemen Eropa (PE) hanya menggunakan produk lokal Eropa.

Gabungan kekuatan politik dari spektrum ideologi Eropa yang berbeda ini menghasilkan Resolusi PE yang melarang sawit sebagai minyak nabati (biofuel) transportasi di Eropa mulai 2021. Sebanyak 485 (60%) dari 751 anggota PE menyetujui resolusi diskriminatif anti-sawit dan menutup mata terhadap tak adanya standar yang sama terhadap produk lokal UE rapeseed, sunflower (bunga matahari) dan soya (kedelai).

Sepuluh fakta

Alasannya adalah deforestasi. EP melihat sawit tidak berkelanjutan dan harus dilarang sebagai bahan minyak nabati di UE. Kita lihat 10 fakta mendasar apakah argumen PE memiliki dasar.

Pertama, laporan UE sendiri menyatakan, penyebab deforestasi tertinggi adalah peternakan, yaitu 24 persen, kedelai (5.4), jagung (3.3), sawit (2.5).

Peternakan sapi, kambing, domba dan babi di UE adalah 335 juta ekor. Di Indonesia hanya 59 juta atau 18 persen dari jumlah di UE. Namun tidak ada gerakan anti-peternakan di PE.

Kedua, data industri Eropa dan AS menunjukkan perluasan pertanian kedelai, rapeseed dan bunga matahari lebih masif daripada sawit. Pada 1965, terdapat 25,8 juta hektar (ha) kedelai, 7 juta ha rapeseed, 7,5 juta ha, bunga matahari, dan 3,6 juta ha sawit. Pada 2016 luasan kedelai mencapai 121 juta ha, rapeseed 33,6 juta ha, bunga matahari 24,69 juta ha dan sawit 20,23 juta ha. Namun tidak ada protes dari LSM lingkungan hidup UE, apalagi dari Indonesia.

Ketiga, data NASA menunjukkan pada November 2015, 56 persen hotspots kebakaran hutan terjadi di luar kawasan konsesi pertanian atau kehutanan, 33 persen di kawasan hutan industri kayu, dan 7 persen di kawasan konsesi sawit.

Data UE pada 2016 dan NOAA menunjukkan, dari rentang 2011-2015 luasan kebakaran hutan di Indonesia (64.000 ha) jauh lebih kecil daripada AS (2,2 juta ha), Rusia (2,3 juta ha), Portugal (84.000 ha), Spanyol (107.000 ha) dan Australia (236.000 ha), serta gabungan Italia dan Yunani (106.000 ha). Satelit NOAA menunjukkan hotspots seluruh Indonesia pada Januari 2018 adalah 51 lokasi, sementara pada 2017 mencapai 89 lokasi. Pada 2015 adalah 22.000 titik. Tingkat kepercayaan NASA mencapai 80 persen, sebaliknya PE tidak peduli dengan data ini.

Keempat, angka deforestasi di Indonesia menurun hingga 30 persen sejak tiga tahun terakhir dari 1 juta ha pada 2014 menjadi 0,47 juta ha pada 2017. Deforestasi disebabkan oleh berbagai hal, dan laju penurunannya dilakukan dengan sejumlah kebijakan tegas dan nyata.

Kelima, Indonesia dinilai memiliki gambut terluas di dunia sehingga harus dilindungi

dan tidak dapat digunakan untuk pertanian. Kenyataannya, sesuai data Wetland International, dari 381 juta hektar gambut global, gambut di Rusia adalah 137.5 juta ha, di Eropa 29 juta ha, 22 juta ha di AS dan di Indonesia 18.5 juta ha.

Dan, bukan rahasia umum lagi bahwa 55,37 persen dan 33 persen gambut di AS, Rusia dan di Eropa menjadi lahan pertanian. Sementara di Indonesia hanya 13 persen. Menjadi tanda tanya apabila tidak ada protes anti-pertanian gambut di Eropa. LSM Indonesia tidak pernah mempertanyakan mengapa bangsa Eropa bercocok tanam di atas gambut.

Keenam, riset ahli gambut Indonesia menunjukkan bahwa stok karbon hutan gambut primer adalah 81 ton per ha, hutan gambut sekunder 57 ton per ha, sawit 9-12 tahun mencapai 54 ton per ha dan sawit 14 tahun lebih mencapai 73 ton per ha.

Ketujuh, data FAO menegaskan bahwa emisi rumah kaca dari sektor pertanian di Indonesia sangat kecil, yaitu 3 persen. UE memegang rekor tertinggi, yaitu 28,8 persen, kemudian China (14 persen), India (13 persen), Brasil (9 persen), dan AS (8 persen).

Kedelapan, pakar Barat menuduh hampir 70 persen sawit di Indonesia merupakan hasil penebangan hutan alamiah secara brutal. Pakar IPB menemukan fakta lain. Pada rentang 1950-2014, perubahan hutan menjadi non-hutan di Indonesia karena berbagai alasan mencapai 99 juta ha.

Pada rentang yang sama, 64 tahun, kebun sawit berkembang dari 597.000 ha menjadi 10 juta ha, suatu proses yang sangat lambat dan membuktikan bahwa sawit bukan penyebab deforestasi. Justru dalam banyak hal, kebun sawit berupa pohon dengan ketinggian 12 meter memberikan peran reforestasi. Total reforestasi sawit mencapai 7,9 juta ha pada 2013. PE tak menghargai ini.



Kesembilan, hasil riset IE Henson dan PPKS menunjukkan data perbandingan serapan karbon dan produksi oksigen antara sawit dan hutan tropis yang penting. Sawit menyerap 64 ton karbon per tahun dan mengeluarkan 18 ton oksigen per tahun, sementara hutan tropis menyerap 42 ton karbon dan mengeluarkan 7 ton karbon per tahun.

Kesepuluh, sawit memerlukan air paling sedikit untuk memproduksi energi per gigajoule, yaitu 85 meter kubik, dibandingkan rapeseed 184 meter kubik, kedelai 100 meter kubik dan bunga matahari 87 meter kubik

Motif sebenarnya: monopoli!

Biofuels di UE tidak hanya dari sawit tetapi juga dari rapeseed, bunga matahari dan kedelai yang ditanam petani secara masif seluas 11.5 juta hektar. Para petani ini dan juga petani di UE lainnya dapat subsidi yang besar, yaitu 59 miliar euro atau hampir Rp 1.000 triliun.

Kekuatan lobi mereka luar biasa. Catherine Bearder, anggota PE dari Liberal Demokrat, membuka data: 25 dari 45 anggota komite pertanian PE adalah petani, eks petani, atau memiliki bisnis terkait pertanian. Media memberitakan bahwa sejumlah anggota PE menerima dana hingga 5.000 pound atau Rp 93 juta per bulan dari bisnis pertanian. Angka ini jauh di atas upah minimum Inggris 1.300 pound.

Greenpeace sendiri mengakui bahwa masukan lobi petani dalam proses pengambilan keputusan UE sangat kuat. Sementara industri minyak nabati UE memiliki lobi yang kuat, antara lain AVRIL GROUP. Menurut data EU Transparency Register, AVRIL memiliki anggaran hingga 4,8 juta euro atau sekitar Rp 78 miliar per tahun dengan 76 pelobi profesional untuk melakukan lobi kepentingan industri minyak nabati di UE.



Salah satu strategi lobi petani dan industri minyak nabati di UE adalah menciptakan fokus terhadap sawit dengan berbagai tema, tanpa memerhatikan data dan fakta. Mulai dari kesehatan hingga lingkungan hidup guna mencapai satu tujuan: menghilangkan sawit dari pasar minyak nabati UE.

Bas Eickhout, Green MEP Belanda menyatakan penggunaan minyak sawit perlu dikurangi hingga nol pada 2021. Sementara Sekjen ePURE Emanuelle Desplechin, produsen ethanol di UE, menyatakan bahwa UE harus berhenti mempromosikan penggunaan minyak sawit dan turunannya dalam biofuel. UE sendiri secara resmi mengajukan anti-dumping terhadap sawit Indonesia sejak November 2013.

Semua data di atas menunjukkan bahwa ideologi anti-sawit di UE bersumber pada persaingan bisnis dari petani dan industri rapeseed, bunga matahari dan kedelai yang ingin menguasai pasar minyak nabati di UE secara penuh.

Argumentasi dan kebijakan apa pun yang dilakukan Indonesia tidak akan pernah diterima oleh mereka. Ibaratnya permainan sepak bola, Indonesia tidak akan pernah menang karena gawangnya selalu dipindahkan. Mereka tidak menghendaki sertifikasi sustainability rapeseed, bunga matahari dan kedelai ataupun analisis mendalam terhadap pertanian di atas gambut Eropa, dampak kebakaran hutan di Eropa.

Permintaan utama Indonesia agar dilakukan dialog yang wajar atas dasar data dan keilmuan secara seimbang pun selalu ditolak. Diskusi secara rasional dengan menggunakan data dikhawatirkan akan merugikan lobi petani dan industri karena hal ini akan membawa pada perlakuan yang sama dan non-diskriminatif terhadap semua produk minyak nabati dalam kesetaraan.

Ideologi anti-sawit ini ternyata juga merambah Indonesia dengan tingkat anomali yang tinggi. Hal ini antara lain terli-

hat dari Surat Terbuka Kepada Presiden RI dan Dewan UE serta Kepala Negara UE tanggal 22 Mei 2018, yang ditandatangani oleh 236 orang.

Dalam butir 1, surat ini setuju terhadap Resolusi PE yang melarang sawit tetapi memperbolehkan rapeseed, kedelai dan bunga matahari. Artinya, mereka menyetujui perilaku diskriminatif politisi Eropa. Mereka tidak meminta sertifikasi atau kebijakan "eco-friendly" terhadap industri rapeseed, kedelai dan bunga matahari di UE. Kini terdapat 236 warga Indonesia di Indonesia yang setuju kebijakan untuk menghukum produk Indonesia dari lembaga politisi asing, yang anggotanya termasuk politisi anti-Islam dan anti-Muslim.

Ekspansi ideologi anti-sawit di Indonesia adalah tantangan yang lebih berat daripada di UE karena hal ini berarti bangsa Indonesia berhadapan satu sama lain, di mana banyak LSM Indonesia yang tak menyadari bahwa motivasi petani dan industri UE bukan lingkungan hidup di Indonesia tetapi kepentingan dagang dan subsidi pertanian. Kita menghadapi strategi divide et empera lagi. Ini mengingatkan kita pada pesan Bung Karno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuangan mu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri."

Perjuangannya akan panjang dan kompleks karena ideologi ini harus dilawan dengan perbaikan kebijakan nasional, dengan data dan ilmu, serta hukum internasional. Sulit, tetapi tidak ada pilihan lain. Indonesia harus terus melawan seperti halnya Komisioner UE Malmstroem terhadap ancaman tarif Trump. Beliau menegaskan "Recently we have seen how it is used as a weapon to threaten and intimidate us. But we are not afraid, we will stand up to the bullies,"

GEOPARK

YANG DI AKUI OLEH UNESCO



LOKASI:
DANAU TOBA, SUMATERA UTARA





Situ Cisanti dan Tujuh Mata Air Hulu *Sungai Citarum*

Saya dan teman, sudah tidak sabar untuk ke Situ Cisanti ini. Oh iya, karena ini Hulu Sungai Citarum, diberikan nama Kilometer 0 Citarum. Ini sangat unik, karena biasanya kita hanya tahu Kilometer 0 di Pulau Weh, atau Sabang.

Kami langsung berjalan menuju ke Situ Cisanti. Kami melewati pepohonan yang rindang dan menuruni tangga untuk bertemu dengan situ Cisanti.

Dari kejauhan kemudian saya melihat ada signage atau tulisan besar Kilometer 0 Citarum. Saya pun langsung menyusuri Situ. Situ ini airnya jernih meskipun terlihat ada ganggang yang tumbuh.

Cukup jauh untuk sampai di Signage Kilometer 0 Citarum ini. Mungkin lebih dari 10 menit berjalan kaki. Sampai di signage ini, saya melihat ada dermaga untuk tempat berfoto. Saya berfoto di sini karena untuk berfoto di Signage, masih menunggu orang lain yang berfoto.

Selesai mengambil gambar, saya kembali menyusuri Situ Citarum tetapi arah yang berbeda. Dan disinilah saya melihat ada petilasan

Prabu Siliwangi dan juga mata air Citarum. Di sini, untuk melihat petilasan Prabu Siliwangi, saya harus meminta izin ke penjaga. Sedikit keramat. Saya dan teman menyempatkan diri untuk membasuh muka dan saya meminum air dari mata air.

Di Mata Air Citarum ini saya juga akhirnya tahu bahwa ada tujuh mata air. Ada Cikawedukan, Citarum, Cikahuripan, Cikoleberes, Cihaniwung, Cisadane, dan Cisanti.

Jadi, Situ Cisanti ini diisi oleh tujuh mata air. Dan air ini kemudian dialirkan ke Sungai Citarum hingga ke hilir. Di Petilasan ini, kita tidak boleh sembarangan berfoto karena harus meminta izin terlebih dahulu. Saya sempat mengambil gambar, tapi anehnya gambar tersebut hilang dari ponsel saya.

Setelah berkeliling dan melihat Situ Cisanti ini, saya dan teman-teman harus kembali ke Bandung. Hari Sudah petang. Sebuah pengalaman yang tidak terlupakan, berkunjung ke Hulu Sungai.

SUATU PAGI DI BAWAH Jembatan Layang

Hari ini sekolah Muning mulai libur. Karena tak ada teman di rumah, gadis kecil berambut ikal itu turut serta ibunya berjualan. Saban hari sebelum matahari rekah sempurna, ibu Muning menggelar lapak di atas trotoar bawah jembatan layang. Berjarak sepelemparan batu, berseberangan dengan stasiun bernama seorang pahlawan bergelar jenderal besar. Diperintahkannya Muning berdiam diri di dekatnya, tak boleh jauh-jauh. Tentu saja Muning merasa bosan dan tak diindahkan. Ibunya terlalu sibuk menata dan menawarkan pisang dagangan.

Sepasang mata bulat Muning mengarah ke stasiun. Kereta api tampak seperti ular-ular besi raksasa yang melata. Mendesis, berhenti beberapa saat untuk bergantian memuntahkan sebagian isi perut. Penumpang yang tumpah, melewati lapak ibu Muning, tapi belum satu pun yang sudi singgah. Mereka menyusuri lorong, lalu menaiki tangga menuju jembatan layang atas. Dari sana, kemudian menyambung langkah dengan naik metromini ke tempat kerja. Raut para pemburu waktu itu tersaput ketegangan, seolah dikejar hantu.

"Waduh, gara-gara kereta ditahan, gue jadi telat!" sungut seorang laki-laki berambut tipis sambil melihat arloji.

"Permisi...! Minggir...! Minggir...!" teriak sesosok perempuan berdandan menor. Langkahnya tergesa menaiki tangga dengan napas terengah. Leleran keringat menghapus bedak di pipinya yang tembem. Hampir saja tubuh gempal itu menubruk Muning.

"Makanya jangan berdiri di situ!" hardik ibu Muning sembari menarik tangan anaknya. "Di sini saja, duduk! Jangan kemana-mana! Nanti di culik orang!" titahnya dengan mata melotot galak. Muning pun terdiam dengan hati masgul.

Hanya duduk sembari melihat hilir mudik orang, membuat bocah lincih itu kembali jenuh. Diambilnya buku gambar dan pensil dari dalam tas yang dibawanya dari rumah. Matanya berkikiran, mencari objek yang menarik. Bangunan stasiun, tembok jembatan layang, kereta, mobil dan sepeda motor yang lalu lalang. Tak ada satu pun mampu menumbuhkan hasrat untuk memulai menggoreskan pensil.

"Enaknya gambar apa ya, Bu?" tanya Muning kepada ibunya.

"Terserah kamu sajalah..." jawab perempuan yang telah lima tahun menjanda itu tak acuh. Telapak tangan kanannya mengibas, mengusir lalat hijau yang nemplok di pisang. Sontak, si lalat hijau terbang menjauh. Kepala Muning mendongak, pandangan matanya berlari mengikuti. Serangga itu pun hinggap pada batang pohon besar dengan cabang yang banyak.

Sebenarnya pohon itu tumbuh pada tempat tak layak. Di atas tanggul, tangga berundak jembatan layang. Terhimpit kerasnya semen dan batu. Yang Kuasa maha adil, ditakdirkan si pohon mempunyai akar yang kokoh menghujam. Menyelinap, lepas mencari tanah. Dengan akar tersebut, menyimpan air dan bertumbuh. Hingga mencapai ukuran seperti sekarang.

"hai, kenapa aku tidak menggambar pohon itu saja, ya?" gumam Muning. Bibirnya mengembang. "Nanti kalau sudah selesai pasti akan menjadi gambar yang keren!" Dalam dunia fantasi Muning, cabang-cabang adalah tangan. Daun-daun dan sulur menjuntai menjelma rambut. Juga sepasang mata dan mulut pada batang, dilengkapi panca indra lain serupa manusia. Pun pohon besar itu bisa berbicara.

"Hai pohon..." Muning memulai bertegur sapa.

"Hai anak manis..." pohon itu membalas.

"Terima kasih ya, telah mengajakku berbincang,"

"Aku suntuk menunggu Ibu jualan.

"Aku ingin mendengar cerita banyak dari kamu..."

"Cerita apa?"

"Apa sajalah..."

"Tapi aku tidak pandai bercerita. Tak banyak bahan yang bisa aku tuturkan. Sejak benihku bertunas sampai sekarang tak pernah aku beranjak dari tempat ini. Kamu tahu, aku tak punya kaki untuk berjalan, "

"Ayolah..." Muning merajuk. Pohon itu terdiam sesaat. Beberapa helai daunnya yang kuning, melayang tertiuip angin. "Bagaimana kalau aku bertutur tentang teman-teman Ibu saja?"

Muning mengenyitkan dahi. "Memang tak ada bahan yang lain, ya? Kata Bu Guru membicarakan orang lain itu dosa. Dan, kelak akan dibakar dengan api neraka,"

"He..he...kamu memang gadis kecil yang pintar. Baiklah...kita tidak akan membicarakan mereka tapi mengamati apa yang mereka kerjakan. Termasuk Ibu..."

"Termasuk Ibu?" tanya Muning tak paham.

"Ya. Supaya kamu tahu,"

"Tahu apa?" sergah gadis kecil itu cepat. Dimatannya, selama ini ibunya adalah sosok perempuan yang tegas dan galak. Bila telat bangun, ditariknya selimut sembari memercikkan air dingin ke muka. Bila makan tak habis, telinga anak semata wayangnya itu akan dijewer hingga merah. Apalagi kalau Muning malas pergi ke sekolah, ia akan marah besar. Tak pelak cubitan kecil akan mendarat di paha.

"Tahu betapa beratnya ibumu mencari uang. Buat makan, jajan ataupun sekolah kamu!"

"Hmm..." Muning berpikir sejenak. Kini dalam benak kanaknya berkecambah tanya. Oh, apa mungkin Ibu sering marah-marah karena capek berjualan, ya? Atau karena aku bandel dan nakal?

"Bagaimana? Setuju atau tidak?" desak pohon besar mulai tak sabar.

"Kalau tidak setuju, aku tidak mau ngomong. Lebih baik aku membisu!" ancamnya kemudian.

"Ba...baiklah. Aku setuju!" akhirnya Muning pun mengalah. Tak ada pilihan lain.

"Sekarang, marilah kuperkenalkan dengan sosok-sosok yang senantiasa hadir di sini. Mereka mengais rezeki di bawah jembatan layang ini. Dimulai dari perempuan kurus di kelokan tangga itu. Lihat, kedua matanya! Walaupun cekung tapi penuh semangat,"

Mata Muning berpaku pandang pada perempuan yang dimaksud si pohon.

Bibirnya tak berhenti bergerak, menawarkan pecel dagangannya kepada para pejalan kaki yang melintas. Sejengkal darinya, duduk seorang lelaki dekil. Kakinya sebelah kiri lebih kecil dari yang kanan. Tampak luka menghitam, bekas tumbukan benda keras. Tangan kurusnya mengacungkan kaleng bekas susu. Berisi beberapa keping recehan uang logam. Gemerincing saat kaleng digoyang-goyang.

"Hai, Du! Sudah dapat berapa?!" lelaki peminta derma itu terlonjak. Seorang lelaki gempal bertato ular kobra di lengan kanan berdiri di hadapan. "Bagi dong, buat ngopi!" Tanpa menunggu

jawaban, lelaki bertato itu merogoh kaleng susu kemudian mendengus. "Busyet! Baru dapat segini?!" Dicapakkannya kaleng susu dan berlalu dengan kesal. Kaleng itu pun penyok. "Itu siapa?" tanya Muning pelan pada pohon. Kecemasan tergambar dari muka polosnya.

"Si Kobra. Ia preman di sini,"

"Sabar, Bang! Ini 'kan masih pagi..." sahut seorang lelaki paruh baya. Peluh berleleran di kening. Di hadapannya bergolak minyak goreng panas dalam wajan.

"Diam Din! Urusin saja gorengan lo!" Lelaki yang dipanggil Udin itu pun tak menggubris. Sudah pasti bentakan Kobra terbiasa mampir di telinganya, hingga ia kebal. Tangan kanannya mencelupkan tempe yang telah diiris ke dalam adonan tepung, lalu menceburkan ke dalam wajan.

"Gorengannya satu berapa, Bang?" seorang pemuda berdiri di hadapan. Kaos merah yang dipakainya tampak basah keringat. Lengket di tubuh kerempengnya.

"Seribu, Mas..." sahut Udin ramah.

"Tempe tipis begini, seribu?" protes si pemuda sembari tangan kanannya membolak-balik gorengan. Udin melirik dengan sebal.

"Bahan mahal, Mas! Semua naik!" ujar Udin sewot.

"Kalau enggak jadi beli enggak apa-apa! Tapi gorengan gue jangan lo diacak-acak begitu!"

"Kenapa, Din?!"

"Enggak apa-apa Bang Kobra!" Udin mengacungkan jempol kanan.

Si pemuda menoleh ke arah sumber suara. Hatinya mendadak mencelos, melihat lelaki kekar berkacak pinggang tak jauh dari mereka. Gegas diulurkannya selebar lima ribuan.

"Ce...cepat bungkus, Bang!"

"Apa saja ini, Mas? Tempe semua?"
"Terserah Abang, deh..." Gegas pemuda itu

merebut kantong kertas yang disodorkan Udin. Langkahnya panjang dan tergesa menaiki tangga. Ia langsung loncat ke dalam metromini yang kebetulan menepi.

Kemacetan mendadak terjadi di bawah jembatan layang. Seorang perempuan bergincu merah muda membuka pintu sedan putih, berjalan tergesa mendekati lapak ibu Muning.

"Pisangnya satu ikat berapa?"
Senyum tebu ibu Muning pun terbit menyambut.

"Satu ikat isi dua, tujuh ribu, Bu.. Silakan pilih! Semuanya bagus-bagus dan manis..."

"Kalau yang ini?" Telunjuk perempuan itu mengarah pada tumpukan ikatan pisang di keranjang sebelah.

"Kalau itu dua belas ribu. Isinya tiga, besar-besar..."
"Sepuluh ribu, ya?" si perempuan menawar.

"Ibu beli berapa? Kalau beli banyak bisa dikurangi harganya..." Ibu Muning terus membujuk.

"Beli lima ikat. Jadi lima puluh ribu, ya?"

"Tambah lima ribu, deh, Bu...Buat penglaris,"

"Yo wislah. Cepat bungkus, aku terburu-buru, nih..." Perempuan bergincu merah muda menyerahkan uang. Ia sambar plastik, dan berjalan gegas kembali menuju sedan putihnya.

Roman ibu Muning pun sontak semringah. Dikibas-kibasnya lembaran lima puluh ribu yang diterima di atas pisang dagangannya sembari bergumam. "Laris...laris..."

"He...he...yang barusan diborong! Sini setor!"
telapak tangan kekar menengadahkan.

Wajah ibu Muning mendongak, Kobra berdiri di hadapan dengan senyum culas. Gesit perempuan itu menyembunyikan uang di balik keranjang. "Nanti saja, Bang! Nanti saja kalau dagangan sudah habis! Pamali kalau pagi-pagi..."

"Halah, alasan! Mana serahkan uang itu!" Kobra

mencekal lengan ibu Muning dengan kasar. Hati Muning sontak tersulut. Tak rela ibunya diperlakukan tak semestinya. Reflek bocah perempuan itu merangsek, tangan mungilnya memukul-mukul Kobra dengan kalap.

"Siapa ini? Bocah ingusan brengsek! Anakmu, ya?!" Kini gantian tangan Kobra mencengkeram lengan Muning.

Ia pun menjerit-jerit kesakitan. "Ja...jangan, Bang...Ampun...Ia masih kecil, Bang..." Ibu Muning memohon, sembari terisak.

"Ini, Bang...ambil uangnya..."
Kobra lekas merebut uang dalam genggamannya Ibu Muning. Lalu dengan congkak berbalik badan. Tawanya keras membahana, seolah mengejek kesialan ibu dan anak itu.

"Ayo gadis kecil! Kamu harus berbuat sesuatu. Tunjukkan keberanianmu!" Pohon tua bercabang seolah berbisik. Mata Muning seketika nanar. Serta merta disambarnya pisau yang tergeletak di meja lapak. Pisau yang biasa dipakai ibunya untuk merapikan tangkai pisang.

Tangan kanan Muning menggenggam erat gagang pisau. Gadis kecil itu mengambil ancang-ancang. Sekuat tenaga berlari, dan menancapkan ujung pisau ke pantat Kobra berkali-kali. Lelaki preman itu memekik, darah merembes dari balik pantat lebarnya.

Reflek, kaki kanannya yang bersepatu lars menendang ke belakang dengan keras. Tepat mengenai kepala Muning! Tubuh lemah itu terpelanting di trotoar. Mengaduh sebentar, lalu diam tak bergerak. Ibu Muning menjerit, pandangannya pun berubah gulita!(*

GALLERY



Foto Vebianto Faladi

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Indonesia-Africa Forum (IAF), di Bali (10/04)



Foto Prayogi Setiawan

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Melakukan Peninjauan dalam GWK (08/08)



Foto Ahmad Budiarmo

Keluarga Besar Kemenko Bidang Kemaritiman adakan Buka Puasa Bersama dengan Tema "Ukhuwah Islamiah" (31/05)



Foto Bella Herlita

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melakukan Media Visit Panitia Nasional AM IMF-WB 2018 di Kompas TV (07/08)



Foto Muchlisa Choiriah

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dengan Menteri Lain Mengunjungi Balai Pengelolaan Mangrove KLHK di Bali Bersama dengan Presiden Bank Dunia, Mr. Jim Yong Kim (06/06)



Foto Muchlisa Choiriah

Menko Luhut Meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, di Bali Bersama dengan Deputi Bidang Infrastruktur dan Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim (08/08)



Foto Muchlisa Choiriah

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dengan Menteri Lain Mengajak Presiden Bank Dunia, Mr. Jim Yong Kim untuk Mengunjungi GWK (06/06)



Foto Bella Herlita

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Melakukan Kunjungan Ke Pondok Pesantren Salafitah Syafiyah, Sukorejo, Situbondo (17/07)



Foto Vebianto Faladi

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melakukan Media Visit Panitia Nasional AM IMF-WB 2018 di Trans Corp (19/07)



Foto Satriyo Nugroho

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menghadiri Undangan Upacara Penyerahan Satuan Kopassus di Lapangan Upacara Makopassus (23/03)

GALLERY



Foto Vebianto Faladi

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Indonesia-Africa Forum (IAF), di Bali (10/04)



Foto Prayogi Setiawan

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Melakukan Peninjauan dalam GWK (08/08)



Foto Ahmad Budiarjo

Keluarga Besar Kemenko Bidang Kemaritiman adakan Buka Puasa Bersama dengan Tema "Ukhuwah Islamiah" (31/05)



Foto Bella Herlita

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melakukan Media Visit Panitia Nasional AM IMF-WB 2018 di Kompas TV (07/08)



Foto Muchlisa Choiriah

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dengan Menteri Lain Mengunjungi Balai Pengelolaan Mangrove KLHK di Bali Bersama dengan Presiden Bank Dunia, Mr. Jim Yong Kim (06/06)



Foto Muchlisa Choiriah

Menko Luhut Meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, di Bali Bersama dengan Deputi Bidang Infrastruktur dan Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim (08/08)



Foto Muchlisa Choiriah

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dengan Menteri Lain Mengajak Presiden Bank Dunia, Mr. Jim Yong Kim untuk Mengunjungi GWK (06/06)



Foto Bella Herlita

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Melakukan Kunjungan Ke Pondok Pesantren Salafiah Syafiyah, Sukorejo, Situbondo (17/07)



Foto Vebianto Faladi

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melakukan Media Visit Panitia Nasional AM IMF-WB 2018 di Trans Corp (19/07)



Foto Satriyo Nugroho

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menghadiri Undangan Upacara Penyerahan Satuan Kopassus di Lapangan Upacara Makopassus (23/03)



Foto Ahmad Budiarto

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menghadiri dan menjadi pembicara dalam Acara HUT ke 37 Stuan 81 Kopassus di Masat 81 Kopassus (29/06)



Foto Bella Herlita

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Rapat Kerja di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR (06/07)



Foto Muchlisa Choiriah

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menerima Miss Grand Indonesia di IT Del, Sumatera Utara (14/07)



Foto Bella Herlita

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Melakukan Media Visit Panitia Nasional Annual Meeting IMF-WB 2018 di Metro Tv, (19/07)



Foto Dinta Audi

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menerima berbincang dengan keluarga Korban KM Sinar Bangun serta Tabur Bunga untuk para korban, di Danau Toba, Simalangun (02/06)



Foto Vebianto Faladi

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Undangan Acara Pidato Ketua DPR RI dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU APBN Tahun 2019



Blue Carbon Summit

Mainstreaming blue carbon into the national agenda to meet global commitments

Coordinating Partners:



Kementerian PPN/
Bappenas



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN